

Pilkada Karawang Ditunda

Itu terungkap saat rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin (30/3) malam, menghasilkan sebuah keputusan penting, yakni penundaan pemilihan kepada daerah di 270 daerah termasuk Karawang yang sedianya diselenggarakan September tahun ini. Dokumen kesepakatan itu ditandatangani oleh lima pejabat yang hadir dalam rapat. Kelimanya adalah Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang memimpin rapat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan SH, dan Plt. Ketua DKPP Muhammad.

Mendengar itu, Ketua KPU Kabupaten Karawang Miftah Farid masih menunggu payung hukum terkait ditundanya Pilkada Kabupaten Karawang. "Kami masih menunggu surat resmi atau payung hukumnya," jelas Miftah kepada Radar Karawang, Selasa (31/3).

Ia melanjutkan, jika terdapat perubahan jadwal waktu pelaksanaan pilkada, KPU Kabupaten Karawang akan menindaklanjuti keputusan dari pusat. Menurut Miftah, langkah tersebut dimaknai sebagai upaya penyelamatan di tengah merebaknya dampak virus impor dari Tiongkok tersebut.

"Menurut hemat kami pilkada harus diselenggarakan dalam situasi tenang, aman, damai dan lain-lain," ujarnya.

Saat disinggung soal anggaran Pilkada Kabupaten Karawang dialihkan untuk penanganan virus corona, Miftah masih menunggu keputusan dari KPU pusat.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, penundaan tahapan pilkada serentak berpotensi menimbulkan tiga masalah baru. Ketiga masalah itu adalah pertanggungjawaban anggaran, berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala daerah yang penunjukan pelaksana tugas (Plt) nantinya cukup politis serta, serta daftar pemilih.

Doli berpandangan,

kemungkinan perlu diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang baru mengenai hal tersebut, karena, soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan segala macamnya terkait ini diatur dalam Permendagri Nomor 13/2006. Kemudian, sambung Doli, kendala lainnya jika pelaksanaan Pilkada 2020 dilakukan pada bulan Februari 2021, tentu akan ada banyak kepala daerah yang masuk akhir masa jabatan mereka. Dalam rapat pun sempat diperdebatkan soal status Plt, karena sudah rahasia umum bahwa selama ini pengisian Plt ini pertimbangannya politis, mencabut orang yang sedang menjabat kemudian diganti dengan Plt.

Terakhir, soal data pemilih. Kalau pada akhirnya pilkada mundur sampai setahun, tentu akan ada perubahan pada data pemilih. "Kita nggak tahu kan nanti berapa yang sudah meninggal, berapa yang memasuki umur 17 tahun, itu nanti saya kira konsekuensi teknis yang perlu diantisipasi terutama oleh KPU," tandasnya. (mra/psn/rb)